

Sinergi Bapenda dan Mahasiswa Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Surabaya di Kecamatan Lakarsantri

Sekar Arum Melati*, Anisa Fitria Utami, Muhammad Taufiq

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: sekararum.melati27@gmail.com

Dikirim : 28 Maret 2025

Direvisi : 14 Mei 2025

Diterima : 15 Mei 2025

Abstrak: Kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk di Surabaya, dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi negara tanpa imbalan langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satunya melalui penyampaian e-SPPT secara langsung. Untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah, Bapenda Surabaya menjalin sinergi dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini melibatkan mahasiswa dalam pendataan objek pajak, penagihan, penyuluhan, dan pengelolaan data pajak. Dengan metode door to door, mahasiswa magang dan pegawai Bapenda menyampaikan e-SPPT langsung ke wajib pajak. Keterlibatan mahasiswa membantu meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam pendistribusian SPPT, pendataan ulang, dan verifikasi lapangan. Sebelumnya, tugas-tugas operasional ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Sinergi antara Bapenda, mahasiswa, kelurahan, dan kader daerah terbukti berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah Surabaya. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini harus menjadi prioritas agar manfaatnya terus dirasakan dan mendukung pembangunan kota.

Kata kunci: mahasiswa magang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan daerah

Abstract: Tax awareness in Indonesia, including Surabaya, remains relatively low due to a lack of understanding that taxes are mandatory contributions to the state without direct compensation, as regulated in Law No. 28 of 2007. Taxpayer awareness plays a crucial role in the successful collection of Land and Building Tax (PBB), particularly through the direct delivery of e-SPPT. To enhance regional revenue realization, the Surabaya Regional Revenue Agency (Bapenda) has collaborated with universities through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. This initiative involves students in tax object data collection, billing, counseling, and tax data management. Using a door-to-door method, student interns and Bapenda officers deliver e-SPPT directly to taxpayers. The involvement of student interns significantly improves work efficiency, especially in SPPT distribution, tax object re-registration, and field verification. Previously, these operational tasks required considerable time and effort. The synergy between Bapenda, student interns, local government offices, and community cadres has contributed to increasing Surabaya's regional revenue. Therefore, the sustainability and development of this program should be prioritized to ensure its continued positive.

Keywords: internship student, Land and Building Tax (PBB), regional income

1. Pendahuluan

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat (Nasir, 2019). Sumber pendapatan daerah sendiri dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Pajak daerah berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBBP2, dan BPHTB. Salah satu komponen dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran. Setiap tahun Bapenda memiliki realisasi dari setiap sumber pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan daerah adalah harapan yang telah direncanakan berupa dokumen yang berisi tentang target dan capaian pendapatan dalam suatu periode (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2021).

Pada saat ini, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih tergolong rendah, begitu pun dengan beberapa masyarakat yang menempati Surabaya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Jaya, 2019). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban adalah hal yang penting dalam keberhasilan pemberitahuan pemungutan pajak PBB melalui penyampaian e-SPPT ke alamat wajib pajak secara langsung (Triaji dkk., 2024).

Kota Surabaya adalah kota yang memiliki tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung segala program yang diadakan untuk pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya mengadakan program magang MSIB dan MBKM yang diikuti mahasiswa dari perguruan tinggi. Kolaborasi ini diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Banyak wajib pajak yang belum memahami

pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah atau bahkan sengaja menghindari kewajiban tersebut. Hal ini berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah sehingga realisasi pendapatan sering kali tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada sektor tertentu seperti pajak reklame, hiburan, dan parkir, potensi pendapatan yang besar tidak tergarap maksimal karena lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pendataan dan administrasi objek pajak. Data yang tersedia sering kali tidak mutakhir sehingga terjadi ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, alamat wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya atau adanya objek pajak baru yang belum terdaftar dalam sistem. Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan penagihan dan verifikasi objek pajak secara efektif. Kesenjangan antara data dan keadaan di lapangan menciptakan potensi kebocoran pendapatan yang signifikan (Zidane, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia di Bapenda Surabaya juga menjadi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan ini. Jumlah tenaga kerja yang terbatas membuat Bapenda kesulitan menjangkau seluruh wilayah Surabaya untuk melakukan pendataan ulang, penagihan pajak, dan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan konvensional dalam penagihan pajak, seperti pengiriman surat pemberitahuan secara manual, juga kurang efektif dalam menghadapi wajib pajak yang tidak responsif atau sulit dijangkau.

Melihat tantangan tersebut, diperlukan langkah inovatif untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Salah satu solusi strategis yang diinisiasi oleh Bapenda Surabaya adalah menjalin sinergi dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa sebagai mitra pendukung dalam berbagai kegiatan, seperti pendataan objek pajak, penagihan, penyuluhan, dan pengelolaan data pajak. Keterlibatan mahasiswa yang memiliki semangat dan keterampilan baru menjadikan program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan yang dialami Bapenda sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Bapenda dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah, tetapi juga menjadi peluang belajar bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pajak daerah. Kolaborasi ini menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam mendukung pembangunan Kota Surabaya secara berkelanjutan (Simba dkk., 2022).

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *door-to-door*, peran serta mahasiswa magang dan pegawai Bapenda dalam menyampaikan e-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB ke alamat wajib pajak secara langsung. Mahasiswa magang bekerja sama dan berbagi tugas dalam menyampaikan e-SPPT PBB bagi yang memiliki tanggungan PBB yang belum dibayarkan ke setiap wilayah di Kecamatan Lakarsantri. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa magang berlangsung pada bulan September-Desember 2024.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembagian tugas oleh koordinator kecamatan (KORCAM). Setiap kecamatan memiliki koordinator kecamatan masing-masing dan satgas/penyampaian himbauan pembayaran tagihan PBB e-SPPT di setiap kelurahan dibagi oleh koordinator wilayah masing-masing. Setiap pagi, koordinator memberikan e-SPPT kepada setiap mahasiswa magang untuk diberikan ke alamat objek pajak yang telah tertulis disana. Selanjutnya, satgas menyampaikan himbauan tagihan PBB dengan memberikan e-SPPT PBB dan melakukan verifikasi serta validasi data melalui berita acara penelitian e-SPPT dilengkapi dengan berita acara penelitian untuk pembaruan data dan melakukan verifikasi setiap objek pajak sesuai dengan alamat yang tertuliskan. Terakhir, melakukan *entry data* hasil dari satgas yang telah dilakukan—hasil penyampaian dan berita acara penelitian kemudian dicantumkan. Tahapan kegiatan ini dirangkum dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat

3. Hasil dan Diskusi

Bapenda Kota Surabaya melakukan berbagai macam program untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, seperti program mobil keliling (*mobling*). *Mobling*

merupakan program kerja dengan mendatangi wilayah wajib pajak agar wajib pajak tidak terkendala dalam jarak ketika akan melakukan pembayaran pajak. Program mobling ini juga membantu wajib pajak yang terkendala biaya karena bisa melakukan pembayaran sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh wajib pajak, seperti ketika ada tunggakan pajak selama 10 tahun, maka wajib pajak bisa membayar 5 tahun terlebih dahulu. Adapun sebelum melakukan mobling, pegawai Bapenda akan membuat spanduk pemberitahuan di sekitar wilayah tersebut dan membagikan surat undangan mobling kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB. Kegiatan persiapan mobling ini berjalan dengan lancar berkat adanya tambahan sumber daya manusia sehingga menghemat waktu dan tenaga (Rahmadanita, 2021).

Sinergi antara Bapenda Kota Surabaya dan mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi telah membawa dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Bapenda, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kesenjangan data administrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Keterlibatan mahasiswa magang menjadikan Bapenda mendapatkan dukungan tenaga tambahan yang berperan penting dalam berbagai tugas operasional, mulai dari pendistribusian e-SPPT, verifikasi data wajib pajak, hingga pencocokan data lama dengan data terbaru. Hasil dari sinergi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Bapenda dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan realisasi pajak yang mendukung pembangunan Kota Surabaya (Nurwahyuni, 2024).

Salah satu kontribusi utama mahasiswa adalah keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tugas satgas pembagian e-SPPT. Sebelum adanya program ini, pendistribusian SPPT sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah-wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Keterlibatan mahasiswa menjadikan proses distribusi lebih cepat dan terorganisir. Mahasiswa berperan langsung dalam memastikan bahwa setiap wajib pajak menerima SPPT mereka tepat waktu sehingga mereka dapat mengetahui kewajiban pajaknya dengan jelas. Dampaknya, kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak daerah meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pembayaran pajak yang meningkat setelah program ini berjalan. Proses distribusi yang lebih terstruktur juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak (Nurwahyuni, 2024). Kegiatan pembagian e-SPPT diperlihatkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan pembagian e-SPPT serta verifikasi dan validasi data di Desa Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri

Selain membantu dalam pembagian e-SPPT, mahasiswa juga berperan penting dalam proses verifikasi berita acara penelitian data wajib pajak. Sebelum adanya program ini, salah satu kendala utama Bapenda adalah kesenjangan antara data administrasi yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan. Mahasiswa magang dilibatkan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap objek pajak dan mencocokkannya dengan data yang ada. Pada proses ini, ditemukan banyak ketidaksesuaian, seperti perbedaan alamat objek pajak, perubahan status kepemilikan properti, atau data objek pajak baru yang belum terdaftar. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data wajib pajak yang dimiliki oleh Bapenda selalu mutakhir dan akurat. Data yang valid menjadikan Bapenda dapat melakukan perhitungan pajak lebih adil dan tepat sasaran sehingga potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal (Mediarti, 2022).

Keterlibatan mahasiswa magang juga memberikan dampak besar terhadap efisiensi kerja di Bapenda. Sebelum adanya program ini, banyak tugas operasional yang memakan waktu lama dan tenaga yang signifikan sehingga dengan tambahan tenaga dari mahasiswa, tugas-tugas seperti pendistribusian SPPT, pendataan ulang objek pajak, dan verifikasi lapangan dapat diselesaikan lebih cepat. Efisiensi ini memungkinkan staf Bapenda untuk fokus pada tugas-tugas strategis lainnya. Kehadiran mahasiswa juga memberikan perspektif baru dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. Contohnya, beberapa mahasiswa memanfaatkan teknologi digital untuk membantu memetakan objek pajak atau mengelola data sehingga proses kerja menjadi lebih modern dan efektif (Andriawan dkk., 2022).

Dampak lain dari sinergi ini adalah peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah seperti diperlihatkan dalam Tabel 1. Setelah pelaksanaan program, jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu meningkat secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari distribusi e-SPPT yang lebih merata dan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak daerah. Selain itu, pendapatan dari sektor pajak tertentu, seperti reklame, hiburan, dan parkir, mengalami kenaikan yang signifikan berkat pendataan ulang yang lebih akurat. Data wajib pajak yang lebih mutakhir, proses penagihan yang lebih terorganisir, potensi pajak yang sebelumnya tidak tergarap dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasilnya, pendapatan daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan yang signifikan yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan Kota Surabaya (Hutapea dkk., 2022).

Tabel 1. Data realisasi Kecamatan Lakarsantri Bapenda Surabaya

KECAMATAN	KELURAHAN	SPPT POKOK	POKOK PBB	JML SSPD REALISASI	REALISASI POKOK MURNI
LAKARSANTRI	BANGKINGAN	3,030	5,299,216,283	1,819	3,620,415,900
LAKARSANTRI	JERUK	3,668	19,195,978,060	2,330	13,420,049,051
LAKARSANTRI	LAKARSANTRI	3,894	24,021,942,671	2,589	20,021,660,163
LAKARSANTRI	LIDAH KULON	7,899	26,652,583,388	5,422	20,054,802,536
LAKARSANTRI	LIDAH WETAN	5,277	19,476,072,780	3,815	16,307,133,819
LAKARSANTRI	SUMUR WELUT	3,542	9,182,539,963	2,732	7,717,283,091
	TOTAL	27,310	103,828,333,145	18,707	81,141,344,560

JML SSPD TUNGGAKAN	REALISASI TUNGGAKAN	REALISASI MURNI + TUNGGAKAN	PROSENTASE (%)
898	579,565,934	4,199,981,834	79.26
553	1,794,976,829	15,215,025,880	79.26
697	2,531,933,838	22,553,594,001	93.89
1,410	3,169,297,965	23,224,100,501	87.14
1,095	3,804,476,227	20,111,610,046	103.26
545	838,810,304	8,556,093,395	93.18
5,198	12,719,061,097	93,860,405,657	90.40

Peningkatan realisasi pajak ini memberikan dampak langsung pada pembangunan kota. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat memberikan Pemerintah Kota Surabaya merasakan leluasa dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Zulkifli dkk., 2017). Selain itu, program ini juga menciptakan efek positif berupa peningkatan kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pajak secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, sinergi antara Bapenda dan mahasiswa magang telah terbukti menjadi solusi strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Bapenda dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah. Melalui keterlibatan mahasiswa, berbagai kendala yang sebelumnya sulit diatasi, seperti kesenjangan data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan lebih baik. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah (Tappi, 2021).

Keberhasilan program ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Program ini dalam jangka panjang dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, Bapenda dapat memanfaatkan keahlian dan inovasi dari berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah. Selain itu, program ini juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam meningkatkan pendapatan daerah. Melalui keberlanjutan dan pengembangan program ini, Kota Surabaya diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah sehingga mampu mencapai target pendapatan yang lebih tinggi di masa depan dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan (Suhardi dkk., 2023).

4. Kesimpulan

Program kolaborasi antara Bapenda Kota Surabaya dan mahasiswa magang terbukti memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Lewat program ini, berbagai kendala yang selama ini dihadapi Bapenda, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, data yang sudah tidak mutakhir, serta hambatan dalam pendistribusian surat tagihan dan verifikasi lapangan dapat diatasi secara lebih efektif. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai tenaga tambahan, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan penting seperti pembagian e-SPPT, pencocokan data, hingga penyampaian surat tagihan secara langsung kepada wajib pajak. Dukungan dari pihak kelurahan dan kader daerah setempat juga memperkuat efektivitas program ini, terutama dalam menjangkau wilayah yang

sulit diakses dan memastikan data wajib pajak terverifikasi dengan tepat.

Dampak nyata lainnya terlihat dari meningkatnya kualitas data perpajakan. Melalui pencocokan data lapangan, mahasiswa magang bersama pegawai Bapenda berhasil menemukan berbagai ketidaksesuaian, seperti perbedaan alamat, luas objek pajak, dan status kepemilikan. Pembaruan data ini membuka peluang bagi peningkatan pendapatan daerah, terutama dari objek pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar. Selain itu, kehadiran mahasiswa juga mendorong efisiensi kerja Bapenda, karena banyak tugas administratif dan teknis yang dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih akurat. Mahasiswa turut membawa sudut pandang segar dalam menghadapi dinamika di lapangan, sekaligus mendapatkan pengalaman langsung mengenai tata kelola pajak daerah.

Ke depan, kolaborasi ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar dampaknya semakin maksimal. Perbaikan sistem teknologi, pelatihan intensif bagi mahasiswa magang, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan. Tidak hanya itu, Bapenda juga disarankan untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi serta menjaring mahasiswa dari beragam latar belakang keilmuan. Dengan pendekatan ini, program magang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang bermakna bagi generasi muda sekaligus mendorong pengelolaan pajak yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapenda Surabaya atas kesempatan dan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan sinergi yang produktif antara instansi pemerintah dan mahasiswa magang.

Daftar Referensi

- Andriawan, Tajuddin, S., & Sunami, U. 2022. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa, *Jurnal Pegguruang: Conference Series*, 4(1), 215–220.
- Hutapea, A.S.M.P., Mahardhika, A.F., Royan, A., & Irawan, F. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 100–106.
- Jaya, I.M.L.M. 2019. Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa)

Yogyakarta dan Surabaya, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 161–183.

- Mediarti, A. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 2(5), 98–105.
- Nasir, M.S. 2019. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Nurwahyuni. 2024. Analisis Kepatuhan dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep, *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(1), 832–841.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 (*audited*). *Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, Sulawesi.
- Rahmadanita, A. 2021. Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Aplikasi E-PBB di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 51–69. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2311>
- Simba, N., Baga, L.M., & Rachmina, D. 2022. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 13(1), 57–63.
- Suhardi, D., Komarudin, M.N., & Prayudi, D. 2023. Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Daerah : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi dan Pelatihan di Desa Sitawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, *PUBLICA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 140–154.
- Tappi, V.P. 2021. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 16-24.
- Triaji, E., Sumiati, I., & Vaughan, R. 2024. Optimalisasi Penggunaan QRIS melalui SPPT Elektronik di Bapenda Kota Bandung, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 137–140.
- Zidane, M.R.D., Nugraha, R.C., Septiana, P., Ginaldo, K., Samsi, A., Abin, G.R., Laia, H.W., Seran, G.G., & Apriliyani, N.V. 2024. Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di Bapenda Kota Bogor, *Karimah Tauhid*, 3(9), 10086–10097.
- Zulkifli, Kalangi, L. & Manossoh, H. 2017. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 171–179.